

# DAMPAK IMPLEMENTASI IFRS TERHADAP PENDIDIKAN AKUNTANSI DI INDONESIA

Nining Ika Wahyuni<sup>1</sup>

## *Abstract*

*This study aims to explore fundamental issues related to the full adoption IFRS in Indonesia, include how accounting education anticipate the application of IFRS in 2012, the readiness of Indonesia's accountants to face the implementation of IFRS and accounting services liberalization and readiness of PPA to create accountants who have the competence and able to compete in the global marketplace.*

*The research method used in this paper is descriptive research method by using data from various literature sources such as books, information from mass media as well as from the Internet.*

*The results of this study indicate that implementation of IFRS will take many changes in mindset, paradigm and patterns of accounting's teaching. Curriculum improvements must be done to create an accountant ready to compete in global market.*

*Keyword: accounting education, IFRS*

## **1. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Munculnya IFRS tak bisa lepas dari perkembangan global, terutama yang terjadi pada pasar modal. Perkembangan teknologi informasi (TI) di lingkungan pasar yang terjadi begitu cepat dengan sendirinya berdampak pada banyak aspek di pasar modal, mulai dari model dan standar pelaporan keuangan, relativisme jarak dalam pergerakan modal, hingga ketersediaan jaringan informasi ke seluruh dunia.

Dengan kemajuan dan kecanggihan TI pasar modal, jutaan atau bahkan miliaran investor dapat dengan mudah masuk ke lantai pasar modal di seluruh penjuru dunia. Pergerakan mereka tak bisa dihalangi lagi oleh jarak atau teritori negara. Para investor dapat dengan mudah bergerak dan berinvestasi dari satu negara ke negara lain, atau sekaligus melakukan investasi di beberapa negara dalam waktu bersamaan. Hal ini dengan sendirinya menuntut adanya satu standar akuntansi yang dibutuhkan baik oleh pasar modal atau lembaga yang memiliki *agency problem*. Yang dimaksud dengan *agency problem* adalah masalah jarak antara *principle* dan *agent* yang dalam relasi membutuhkan jembatan antara pemilik dan buruh atau pekerja yang disebut *agency relation*, yaitu informasi. Informasi yang dimaksud disini berupa laporan tentang aset, *resources*, dan

---

<sup>1</sup> Dosen Jurusan Akuntansi Universitas Jember

lainnya yang berhubungan dengan keadaan perusahaan yang dibuat oleh *agent* dan diserahkan kepada *principles* (pemilik). Biaya yang dikeluarkan untuk menjaga hubungan baik antara *principles* dan *agent* disebut *agency cost*. Fenomena inilah yang kemudian mendorong International Accounting Standard Boards (IASB) melakukan percepatan harmonisasi standar akuntansi internasional melalui apa yang disebut International Financial Reporting Standard (IFRS).

IFRS telah digunakan oleh lebih dari 150 negara, termasuk Jepang, China, Kanada, dan 27 negara Uni Eropa. Sedikitnya, 85 dari negara-negara tersebut telah mewajibkan laporan keuangan mereka menggunakan IFRS untuk semua perusahaan domestik atau perusahaan tercatat (*listed*). Bagi perusahaan-perusahaan yang sudah *go international*, atau yang memiliki partner dari Uni Eropa, Australia, Russia, dan beberapa negara di Timur Tengah memang tidak punya pilihan lain selain menerapkan IFRS. Bagi Indonesia peralihan ke IFRS ini merupakan pilihan yang tak bisa dihindari. Sebab, Indonesia sudah menjadi bagian integral dari pasar dan perekonomian global.

Pada tanggal 23 Desember 2008, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) meresmikan (*grand launching*) program konvergensi *International Financial Reporting Standards* (IFRS), yaitu prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia (*Indonesian GAAP*) akan dikonvergensi secara penuh dengan IFRS pada tanggal 1 Januari 2012. Tentu saja hal ini akan menjadi suatu tantangan bagi dunia pendidikan terutama perguruan tinggi yang notabene dituntut untuk segera membuat perubahan dan mengambil langkah-langkah tertentu sehingga dapat mensukseskan rencana adopsi secara penuh standar akuntansi internasional tersebut. Oleh karena itu, penulis ingin mencoba memaparkan tentang kesiapan dunia pendidikan di Indonesia untuk menghadapi implementasi IFRS.

### 1.2. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas maka tulisan ini berusaha untuk mengupas permasalahan pokok terkait dengan rencana pengadopsian secara penuh (*full adoption*) IFRS di Indonesia, yaitu:

1. Bagaimana dunia pendidikan mengantisipasi pemberlakuan IFRS 2012?
2. Siapkah para akuntan Indonesia menghadapi pemberlakuan IFRS dan liberalisasi jasa akuntansi?
3. Mampukah lembaga-lembaga penyelenggara PPA melahirkan akuntan-akuntan yang memiliki kompetensi berstandar internasional dan mampu bersaing di pasar global?

Hasil penelitian dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a) Memberikan suatu wacana tentang kesiapan dunia pendidikan di Indonesia khususnya perguruan tinggi dalam implementasi IFRS 2012.
- b) Memberikan suatu wacana tentang peluang dan tantangan yang mungkin akan dihadapi oleh para akuntan Indonesia dengan diberlakukannya IFRS.
- c) Memberikan suatu wacana tentang kesiapan para penyelenggara PPA untuk dapat melahirkan akuntan-akuntan yang memiliki kompetensi berstandar internasional dan mampu bersaing di pasar global.

### 1.3. Metoda Penelitian

Metoda penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah metoda penelitian deskriptif dengan menggunakan sumber data dari berbagai literature berupa buku, informasi di media cetak maupun elektronik serta dari internet.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Sejarah International Financial Reporting Standards IFRS

Terdapat dua badan penyusun standar yang berkaitan dengan praktik akuntansi secara internasional yaitu The International Accounting Standards Committee (IASC) dan The International Federation of Accountant (IFAC). IASC lebih berkonsentrasi untuk menyusun International Accounting Standards (IAS). Organisasi ini memiliki tujuan mengembangkan dan mendorong penggunaan standar akuntansi global yang berkualitas tinggi, dapat dipahami dan dapat diperbandingkan (Choi et al.,1999). Sedangkan IFAC lebih memfokuskan pada upaya pengembangan International Standard Audits (ISA), kode etik, kurikulum pendidikan, dan kaidah-kaidah bagi akuntan dalam berbisnis. Kesepakatan pembentukan IASC terjadi pada Juni 1973 di Inggris yang diwakili oleh organisasi profesi akuntansi dari sembilan negara, yaitu Australia, Canada, Prancis, Jerman Barat, Jepang, Mexico, Belanda, Inggris, dan Amerika Serikat. IFAC didirikan oleh badan profesi akuntan dari 63 negara pada bulan Oktober 1977.

Pada April 2001 The International Accounting Standards Committee (IASC) berkembang menjadi The International Accounting Standards Board (IASB), yang oleh karena perkembangan ini maka International Accounting Standards (IAS) kemudian juga dikembangkan menjadi International Financial Reporting Standards (IFRS). IFRS yang pertama terbit pada Juni 2003.

Berbeda dengan standar lokal/PABU lokal yang berbeda antar negara dan pasar modal, IFRS adalah seperangkat aturan yang seragam dan secara teori, diaplikasikan dengan cara yang sama terhadap semua perusahaan publik di pasar modal atau negara yang mengadopsi standar ini. IFRS sebagai sebuah kerangka dan interprestasinya yang diadopsi oleh IASB memiliki peraturan yang luas terdiri dari:

1. International Standard Audits (IAS) – standar yang diterbitkan sebelum 2001.
2. International Financial Reporting Standards (IFRS) – standar yang dikeluarkan setelah tahun 2001.
3. Standing Interpretations Committee (SIC) – yang diterbitkan sebelum 2001.
4. International Financial Reporting Issues Committee (IFRIC) – yang diterbitkan setelah tahun 2001.
5. Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements.

Sebagian besar standar yang menjadi bagian dari IFRS sebelumnya merupakan International Accounting Standards (IAS). IAS diterbitkan antara tahun 1973 sampai dengan 2001 oleh International Accounting Standards Committee (IASC). Pada bulan April 2001, IASB mengadopsi seluruh IAS dan melanjutkan pengembangan standar (Natawidnyana, 2008).

### 2.2 Tujuan dan Manfaat adopsi penuh IFRS

Dengan mengadopsi penuh IFRS, laporan keuangan berdasarkan PSAK tidak memerlukan rekonsiliasi signifikan dengan laporan keuangan berdasarkan IFRS. Beberapa penelitian berikut menunjukkan manfaat pengadopsian IFRS.

Amstrong et al. (2000) dan Covrig et al. (2007) berdasarkan studi empirisnya menyatakan bahwa pelaporan berbasis IFRS menjadikan biaya untuk membandingkan antar pasar modal dan antar negara menjadi lebih *less costly*. Komparabilitas yang semakin tinggi membuat pelaporan keuangan lebih berguna bagi investor dan pemegang pancang (stakeholders). Selain itu, penggunaan seperangkat standar akuntansi yang sama antar perusahaan dari negara yang berbeda meningkatkan kemampuan para investor asing (*outsiders*) untuk mendeteksi praktik manajemen laba dan manipulasi akuntansi, seperti dengan membatasi perlakuan akuntansi yang *permissible*. Sehingga, jika perpindahan menuju adopsi IFRS dalam faktanya dapat meningkatkan daya banding pelaporan perusahaan, hal tersebut pada giliran berikutnya dapat meningkatkan likuiditas pasar dan menurunkan *cost of capital*. Perbedaan dalam standar akuntansi juga dipandang sebagai hambatan terhadap investasi lintas negara (Bradshaw et al., 2004; Aggarwal et al., 2005). Sebaliknya, pelaporan keuangan yang lebih mudah dipahami oleh investor dari luar negeri akan dapat meningkatkan likuiditas pasar modal dan memperluas basis investor perusahaan, dan pada tahapan berikutnya akan meningkatkan pembagian risiko (*risk-sharing*) dan *cost of capital* yang lebih rendah (Merton, 1982). Dengan demikian, pergerakan global menuju pelaporan berbasis IFRS dapat memfasilitasi investasi lintas negara dan integrasi pasar modal (Covrig et al., 2007).

Bukti lain dari studi tentang pengaruh adopsi IFRS terhadap pasar modal, antara lain dikemukakan oleh Ball, Kothari, dan Robin (2000); Ball, Robin, dan Wu (2000); Leuz (2003), Ball dan Shivakumar (2005) serta Burgstahler, Hail, and Leuz (2006). Hasil penelitian mereka sesuai dengan *incentive-based view* menyatakan bahwa struktur institusional suatu negara memainkan peranan penting untuk menjelaskan dampak adopsi IFRS terhadap pasar modal. negara dengan badan regulatornya yang lebih ketat dan dengan struktur institusional yang mendorong insentif yang kuat terkait dengan pelaporan (*strong reporting incentive*) cenderung lebih memperlihatkan dampak adopsi terhadap pelaporan berbasis IFRS. Sejalan dengan hal ini beberapa negara telah memperkuat regulasi mereka dalam rangka pengadopsian IFRS. Sebagai contoh, Uni Eropa pada tahun 2003, melalui the Committee of European Securities Regulators (CESR) menerbitkan standar No.1 yang antara lain berisi dorongan untuk mengembangkan dan mengimplementasikan pendekatan yang umum berdasarkan IFRS.

### III. PEMBAHASAN

Perubahan tata cara pelaporan keuangan yang sebelumnya banyak mengacu pada US GAAP ke IFRS akan memiliki dampak sangat luas. Setidaknya, para praktisi di bidang akuntansi dituntut untuk memiliki “kompetensi baru” seperti yang disyaratkan IFRS. Pengajaran akuntansi di kampus harus segera dimutakhirkan, seiring kebijakan Indonesia yang telah mendeklarasikan penggunaan konvergensi sistem akuntansi internasional atau International Financial Reporting Standards (IFRS). Mata kuliah yang terkena dampak besar dari IFRS ini adalah pengantar akuntansi, akuntansi keuangan menengah, teori

akuntansi, akuntansi internasional, akuntansi keuangan lanjutan, seminar akuntansi atau akuntansi topik khusus, metodologi penelitian, serta analisis laporan keuangan. Hingga saat ini, di kalangan praktisi, akademisi, dan pengurus IAI masih terdapat pendapat yang beragam. Ada yang mengaku Indonesia telah siap, termasuk dari segi pendidikan keprofesiannya. Namun, tidak sedikit yang meragukannya (Akuntan Indonesia edisi 17: halm.21)

### 3.1 Dampak terhadap pendidikan

Proses konvergensi PSAK dengan IFRS akan berdampak terhadap pendidikan, antara lain:

1. Perubahan *mind-stream* dari *rulebased* kepada *principle-based*.

Adopsi IFRS secara penuh bukanlah hanya sekadar perpindahan pendekatan akuntansi dari *historical cost* ke *fair value*. Inti masalah yang lebih mendasar dari adopsi IFRS adalah perubahan konsep, paradigma, atau pola pikir. Karena jika memang mengadopsi IFRS secara penuh berarti akan terjadi peralihan dari *rule based* ke *principles based* dalam sistem akuntansi.

U.S. GAAP merupakan standar akuntansi yang lebih merefleksikan *rule-based* sedangkan IFRS secara umum dipandang sebagai standar yang lebih merefleksikan *principle-based* (Schipper, 2003). Nelson (2003) mendefinisikan *rule-based* sebagai ketentuan atau kriteria yang spesifik yang mencakup batasan-batasan yang sangat jelas, contoh-contoh, pembatasan jangkauan, pengecualian, penduan implementasi, dan sebagainya. *Rule-based accounting standards* memberikan aturan-aturan yang sangat detail untuk setiap aplikasi dari standar. Hal ini mendorong timbulnya perilaku *check-the-box* dalam pelaporan keuangan yang menghilangkan *judgment* dalam praktik pelaporan.

Untuk dapat memahami *rules-based* dan *principles-based accounting standards*, bisa digambarkan melalui ilustrasi berikut ini (Mainess et al., 2003 dalam Arifin, 2009).

Contoh 1: “Tarif beban depresiasi tahunan untuk semua aset tetap adalah sebesar 10% dari kos aset sampai aset selesai didepresiasi secara penuh”

Dalam contoh 1 di atas, standar tidak memberikan ruang untuk melakukan *judgement* atau ketidaksetujuan mengenai tarif beban depresiasi yang harus digunakan. Meskipun dengan aturan seperti itu tingkat komparabilitas dan konsistensi dapat terjamin, tetapi relevansinya akan berkurang bersamaan dengan ketidakmampuannya dalam menggambarkan kondisi ekonomi sebenarnya yang melatar belakangi, dimana di antara masing-masing perusahaan mungkin berbeda.

Contoh2: “Tarif beban depresiasi untuk tiap periode seharusnya menggambarkan tingkat penurunan nilai ekonomi dari aset selama periode manfaat.”

Dalam contoh 2, standar tersebut memerlukan aplikasi *judgement* dan keahlian dari manajer dan auditor. Akibatnya komparabilitas laporan keuangan akan berkurang dan mungkin tidak konsisten dari waktu ke waktu. Standar berbasis prinsip memberi keunggulan dalam hal memungkinkan manajer memilih perlakuan akuntansi yang merefleksikan transaksi atau kejadian ekonomi yang mendasarinya, meskipun hal sebaliknya dapat terjadi. Standar berbasis prinsip memungkinkan manajer, anggota komite audit, dan auditor menerapkan *judgment* profesionalnya untuk lebih fokus pada merefleksi

kejadian atau transaksi ekonomi secara substansial, tidak sekedar melaporkan transaksi atau kejadian ekonomi sesuai dengan standar.

US GAAP yang berifat *rule based* memberi aturan baku pelaporan keuangan dengan syarat-syarat dan ketentuannya yang ditentukan secara mendetail, sedangkan dalam *principles based* hanya mengatur prinsipnya. Jadi, peralihan ke IFRS berarti peralihan paradigma dan pola pikir. Penyiapan ke arah perubahan paradigma, konsep, dan pola pikir seperti ini belum banyak dilakukan di lingkungan perguruan tinggi. Begitu mendasarnya masalah ini, maka sejak dini pendidikan akuntansi harus sudah disiapkan dengan matang.

### 2. Banyak menggunakan *professional judgement*.

Dengan diterapkannya IFRS, dunia pendidikan dituntut untuk mampu mengubah pola pengajaran maupun pola pikir mahasiswa sehingga menghasilkan para akuntan yang sesuai dengan kebutuhan global. Pendidikan akuntansi dulunya banyak menggunakan buku-buku ajar dari Amerika yang notabene berdasarkan *rule based*. Mahasiswa biasa diajarkan petunjuk pelaporan keuangan dan implementasi secara detail sehingga mengurangi ketidakpastian dan menghasilkan aplikasi aturan-aturan spesifik dalam standar secara mekanis.

IFRS tidak menyediakan aturan-aturan detail pengaturan pelaporan. Oleh karena itu mahasiswa harus mulai diajarkan bagaimana pengambilan keputusan berdasarkan prinsip akuntansi. Pengadopsian IFRS mensyaratkan akuntan maupun auditor untuk memiliki pemahaman mengenai kerangka konseptual informasi keuangan agar dapat mengaplikasikan secara tepat dalam pembuatan keputusan. Dalam *principles-based system*, akuntan akan membuat sejumlah estimasi yang harus dia pertanggungjawabkan dan mensyaratkan semakin banyak judgment professional (Schipper, 2003). Fleksibilitas dalam standar IFRS yang bersifat *principles-based* akan berdampak pada tipe dan jumlah skill professional yang seharusnya dimiliki oleh akuntan dan auditor. Pengadopsian IFRS mensyaratkan akuntan memiliki pengetahuan yang cukup mengenai kejadian maupun transaksi bisnis dan ekonomi perusahaan secara fundamental sebelum membuat judgment. Berbagai estimasi yang dibuat oleh manajemen perlu dinilai kelayakannya oleh auditor sehingga auditor juga dituntut memiliki kemampuan menginterpretasi tujuan dari suatu standar. *AAA Financial Accounting Standard Committee* (2003) bahkan meyakini kemungkinan meningkatnya konflik antara auditor dan klien. Selain keahlian teknis, akuntan juga perlu memahami implikasi etis dan legal dalam implementasi standar (Carmona & Trombetta, 2008). Dengan membandingkan tiga standar, Benneth et al. (2006) menyimpulkan bahwa *principles-based standards* mensyaratkan judgment professional baik pada level transaksi maupun pada level laporan keuangan.

### 3. Banyak menggunakan *fair value accounting*:

Berbeda dengan FASB yang tidak mengakui *fair value* sebagai dasar untuk mengukur asset, *fair value* ditetapkan oleh International Accounting Standard Board (IASB) sebagai dasar untuk mengukur aset. Namun Seiring perkembangan zaman, ternyata penggunaan *historical cost* tidak lagi relevan karena kredibilitas dan kegunaan laporan keuangan telah terhambat oleh tantangan yang serius. Dan banyak orang yang berpendapat dan yakin bahwa standard akuntansi yang menggunakan *historical cost* memainkan peranan

penting sebagai penyebab kerusakan perekonomian, terutama lembaga simpan pinjam tahun 1980an dan masalah perbankan 1990an. Karena pada waktu itu banyak laporan keuangan yang tidak mengungkapkan kerugian segera pada saat terjadi. Sehingga terdapat kesepakatan bahwa standar akuntansi yang ada perlu diperbaiki untuk. Oleh karena itu, FASB dan IASB bekerja sama untuk berusaha mengharmonisasikan standar akuntansi masing-masing. Pertanyaan mengenai bagaimana aset seharusnya diakui di neraca merupakan salah satu isu penting yang harus dicari solusinya. Untuk itu baik IASB maupun FASB melakukan pengujian secara seksama terhadap fair value, tentang arti dari fair value dan bagaimana seharusnya diaplikasikan.

Selama ini masih banyak perbedaan pendapat mengenai fair value. Argument yang menentang akuntansi berdasarkan nilai pasar menyatakan bahwa *market value accounting* kurang dapat dipercaya dan menjadi halangan utama dalam penerapannya serta menganggap model *historical cost* lebih unggul sebab lebih dapat dipercayai (tingkat reliabilitasnya lebih tinggi). Namun masalah yang selalu melekat adalah bahwa model akuntansi berdasarkan *historical cost* tidak mengakui adanya perubahan nilai bersifat ekonomis dan cenderung membiarkan perusahaan memilih sendiri apakah dan kapan mengakui adanya perubahan tersebut. Ini mendorong adanya bias dalam pemilihan apa yang dilaporkan. Akan tetapi, hal yang cukup menarik adalah bahwa angka-angka yang dilaporkan dengan sistem akuntansi berdasarkan nilai pasar mempunyai korelasi sangat kuat dengan harga saham, dan memberi petunjuk bahwa nilai berdasarkan pasar lebih baik (lebih terpercaya) dari pada nilai berdasarkan *historical cost*. Penggunaan *fair value accounting* dalam dunia pendidikan dan dalam dunia bisnis akan menyebabkan *smoothing income* menjadi semakin sulit dengan penggunaan *balance sheet approach* dan *fair value*. Akan tetapi, meskipun mempunyai keunggulan, sistem *market value accounting* berpotensi rentan terhadap manipulasi dan kesalahan estimasi.

4. IFRS selalu berubah dan konsep yang digunakan dalam suatu IFRS dapat berbeda dengan IFRS lain, misalnya *lease* menggunakan *risk and reward concept*, sedangkan *service concession arrangement* menggunakan *controllability concept*, dan pemutakhiran (*updating*) IFRS merupakan suatu keharusan.

5. Perubahan *textbook* dari US GAAP kepada IFRS.

Salah satu masalah utama terkait dengan persiapan implementasi International Financial Reporting Standard (IFRS) atau standar laporan keuangan internasional di lingkungan perguruan tinggi adalah belum adanya kurikulum baku dan terbatasnya buku-buku teks. Meskipun adopsi IFRS sudah lama dicanangkan, namun kurikulum dan buku-buku teks yang diajarkan di perguruan tinggi masih berkiblat ke Amerika Serikat. Buku teks yang terkait dengan IFRS masih sangat kurang atau hampir tidak ada. Untuk mengatasi hal ini IAI sudah berinisiatif kerja sama dengan Australia untuk mencoba menyusun materi IFRS sebagai bahan pengajaran di kelas.

6. Peluang Riset.

Pengadopsian International Reporting Standard (IFRS) juga akan membawa dampak pada riset akuntansi. Berdasarkan review terhadap berbagai riset mengenai dampak pengadopsian IFRS, terdapat dua kelompok besar riset yang dapat dilakukan mengenai dampak pengadopsian IFRS, yaitu (1) dampak

pengadopsian IFRS terhadap perilaku partisipan dalam proses pelaporan keuangan, dan (2) dampak pengadopsian IFRS terhadap kualitas pelaporan keuangan.

Untuk kondisi Indonesia, riset kelompok kedua belum bisa dilakukan hingga tersedianya laporan keuangan berbasis IFRS pada tahun 2012. Namun demikian, peneliti bisa melakukan riset kelompok pertama tanpa harus menunggu pengadopsian penuh IFRS pada 2012. Beberapa peluang riset dampak pengadopsian IFRS pada kelompok pertama adalah (1) survey kesiapan berbagai pihak dalam pengadopsian IFRS, termasuk kesiapan dunia pendidikan mensuplai lulusan yang paham IFRS; (2) determinan kinerja judgment; (3) level presisi standard (rules-based vs. principles based) terhadap (berbagai) judgment preparer maupun auditor; (4) level presisi standar (rules-based vs. principles based) terhadap konflik antara manajemen dan auditor, dan negosiasi; dan (5) peran komite audit dalam konflik manajemen – auditor. Adapun beberapa peluang riset dampak pengadopsian IFRS di kelompok kedua adalah (1) dampak terhadap komparabilitas laporan keuangan dalam satu yurisdiksi akuntansi; (2) dampak terhadap kualitas laba dengan berbagai proksi; (3) peran komite audit dan mekanisme corporate governance lain; (4) kebermanfaatan informasi akuntansi (misal rasio-rasio keuangan) sebelum dan sesudah adopsi IFRS; (5) riset pengungkapan; dan (6) riset pilihan metoda akuntansi.

### **3.2 Bagaimana dunia pendidikan mengantisipasi pemberlakuan IFRS 2012**

Kesiapan pendidikan profesi memperoleh sorotan khusus berkaitan dengan akan diberlakukannya IFRS dan liberalisasi jasa akuntansi di wilayah ASEAN (*ASEAN MRA Framework on Accountancy*). Tidak dapat dipungkiri para praktisi di bidang akuntansi dituntut untuk memiliki “kompetensi baru” seperti yang disyaratkan IFRS. Salah satu titik krusial terkait rencana Indonesia menerapkan Standar Laporan Keuangan Internasional (*International Financial Reporting Standard/IFRS*) pada tahun 2012 adalah kesiapan pendidikan profesi akuntansi (PPA).

Banyak kalangan menilai dari segi pendidikan kita belum siap. Dikhawatirkan, lulusan PPA nantinya tidak memiliki kompetensi IFRS. Lembaga yang paling berkompeten untuk menyesuaikan PPA dengan standar pendidikan akuntansi internasional atau *International Education Standard (IES)* adalah *Kompartemen Akuntan Pendidik (KAPd)* *Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)* serta *Komite Evaluasi dan Rekomendasi PPA (KERPPA)*.

Sebagai konsekuensi dari pemberlakuan IFRS, KAPd telah mengadopsi standar pendidikan internasional (*International Education Standard/IES*) yang dikeluarkan *International Federation of Accountants (IFAC)*. IFAC mengeluarkan tujuh standar pendidikan internasional yang berlaku efektif per 1 Januari 2005. IES tersebut meliputi *Entry Requirement to a Program of Professional Accounting Education* yang dikenal dengan kode IES-1, *Content Of Professional Accounting Education Programs (IES-2)*, *Professional Skills Contents (IES-3)*, *Professional Values, Ethics, and Attitudes (IES-4)*, *Practical Experience Requirements (IES-5)*, *Assessment of Professional Capabilities and Competence (IES-6)*, dan *Continuing Professional Development: A Program of Lifelong*



*Learning and Continuing Development of Professional Competence (IES-7)*. IES merupakan panduan global untuk membentuk akuntan yang profesional, termasuk PPAk di Indonesia. Selain itu KAPd juga melakukan beberapa langkah dalam menghadapi implementasi IFRS. *Pertama*, menyelesaikan penyusunan standar akuntan. *Kedua*, menjalin kerja sama dengan kompartemen atau asosiasi lain guna mendukung rencana penerapan IFRS dan *fair value*. *Ketiga*, mendorong pembuatan materi ajar dan penelitian-penelitian tentang penerapan IFRS.

Pihak lain yang tidak luput dari tanggung jawab terhadap keberhasilan implementasi IFRS adalah kalangan akademisi, dalam hal ini perguruan tinggi (PT). Di tengah perkembangan perekonomian global yang demikian cepat, diperlukan penyesuaian-penyesuaian yang cepat pula di bidang pendidikan profesi akuntan jika tidak ingin terjadi *gap* yang sangat lebar antara materi yang diajarkan akademisi dengan perkembangan yang terjadi di lapangan. Kalau tidak akan terus terjadi *gap* yang lebar antara *out put* lembaga pendidikan dengan kebutuhan pasar. “Adopsi IFRS secara penuh berarti akan terjadi peralihan dari *rule based* ke *principles based* dalam sistem akuntansi. Penyiapan ke arah perubahan paradigma, konsep, dan pola pikir seperti ini harus mulai dilakukan di lingkungan perguruan tinggi yaitu melalui pemutakhiran kurikulum dan silabus PPA, seminar-seminar dan pelatihan-pelatihan tentang IFRS serta penyusunan buku teks yang sesuai dengan IFRS. Selain itu KAPd juga banyak menggelar *workshop* nasional bagi kalangan dosen dengan tujuan *training for the trainer* (TOT). TOT ini diproyeksikan bisa ditiru dan menyebar ke berbagai daerah. Targetnya, lulusan pendidikan akuntan di Indonesia bisa bersaing dengan lulusan luar negeri dan mampu memenuhi tuntutan IFRS.

### 3.3 Akuntan, Jumlah VS Kompetensi

Profesi akuntan akan memainkan peran makin penting dalam perekonomian nasional saat Indonesia mulai menerapkan International Financial Reporting Standard (IFRS) pada 2012. Namun, karena keterbatasan pendidikan, jumlah dan kompetensi akuntan Indonesia terbilang belum memadai.

Data dan fakta-fakta yang disampaikan Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai Departemen Keuangan pada Dialog Komite Evaluasi dan Rekomendasi Pendidikan Profesi Akuntan (KERPPA) IAI yang dilaksanakan pada 20 Mei 2009 menunjukkan bahwa dibanding dengan negara-negara lain, kondisi profesi akuntan di Indonesia masih memprihatinkan baik dari sisi jumlah maupun kompetensi. Karena itu, daya saing jasa akuntansi di Indonesia masih terbilang rendah. Per 30 April 2009, jumlah akuntan beregister sebanyak 46.633 orang. Sementara itu, jumlah akuntan yang telah mengikuti ujian sertifikasi akuntan publik (USAP) dan lulus hanya 615 orang. Namun, tak semua akuntan lulusan USAP tersebut kemudian berpraktik menjadi akuntan publik. Sebagai gambaran, per 1 Januari 2009, dari 615 lulusan USAP tersebut, hanya 158 orang atau 25,69 persen yang berpraktik sebagai akuntan publik. Selebihnya, bekerja di tempat atau bidang lain. Ini yang menyebabkan perkembangan jumlah akuntan publik di Indonesia lebih rendah dibanding negara-negara Selain itu, kontribusi pendidikan profesi juga terbilang minim dalam menyuplai atau mencetak akuntan. Saat ini, misalnya, baru ada 36 perguruan tinggi (PT) yang mendapatkan rekomendasi menyelenggarakan program Pendidikan Profesi Akuntan (PPA). Indarto mencatat total lulusan PPA dari perguruan tinggi negeri hanya 2.153.

Atau, pada 2008 ada sedikitnya 162.205 mahasiswa akuntansi yang aktif. Namun, jumlah akuntan publik di Indonesia hingga tahun 2009 baru 887. Jumlah yang sangat tak memadai jika dibanding populasi penduduk Indonesia yang mencapai 220 juta jiwa. Bandingkan, misalnya, jumlah akuntan publik Malaysia yang sudah mencapai 2.410 orang, Thailand (6.070 orang), Filipina (4.011 orang), atau Vietnam (1.046). Bahkan, Singapura sebagai negara yang luasnya cuma seperti DKI Jakarta itu jumlahnya hampir sama dengan Indonesia, 862 orang. Namun, akuntan yang telah mengantungi Certified Public Accountant (CPA) jumlahnya mencapai 14.261 orang.

Kondisi seperti ditunjukkan oleh data di atas dapat merupakan suatu peluang sekaligus hambatan bagi para mahasiswa yang saat ini sedang menempuh jurusan akuntansi. Akan menjadi peluang, jika kita mampu memanfaatkan keadaan tersebut dengan sebaik-baiknya. Pasar modal yang semakin berkembang dan pertumbuhan perekonomian akan menyebabkan kebutuhan pasar yang besar terhadap profesi akuntan. Namun, apabila pasar domestik tidak dapat memenuhi kebutuhan akan profesi akuntan ini ataupun jika kualifikasi yang di sediakan oleh pasar domestik tidak sesuai dengan kebutuhan internasional, maka tidak mustahil tantangan terbesar akan muncul dengan datangnya akuntan-akuntan dari negara lain yang dapat dengan mudah mengambil lahan pekerjaan kita.

#### IV. SIMPULAN

Keputusan IAI untuk mengadopsi IFRS secara menyeluruh di tahun 2012 membawa banyak pengaruh pada dunia pendidikan akuntansi. Adopsi IFRS antara lain akan membawa perubahan pada pola pikir, paradigma dan pengajaran akuntansi harus memulai berubah dari *rule based* ke *principle based*.

IFRS tidak menyediakan aturan-aturan detail pengaturan pelaporan. Oleh karena itu mahasiswa harus mulai diajarkan bagaimana pengambilan keputusan berdasarkan prinsip akuntansi. IFRS selalu berubah sehingga bagi dunia pendidikan pemutakhiran (*updating*) IFRS merupakan suatu keharusan. Pengadopsian International Reporting Standard (IFRS) juga akan membawa dampak pada riset akuntansi.

Lembaga yang paling berkompeten untuk menyesuaikan PPA dengan standar pendidikan akuntansi internasional atau International Education Standard (IES) adalah Kompartemen Akuntan Pendidik (KAPd) Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) serta Komite Evaluasi dan Rekomendasi PPA (KERPPA). Dalam rangka adopsi IFRS secara penuh di tahun 2012, KAPd banyak menggelar *workshop* nasional bagi kalangan dosen dengan tujuan *training for the trainer* (TOT). TOT ini diproyeksikan bisa ditiru dan menyebar ke berbagai daerah. Targetnya, lulusan pendidikan akuntan di Indonesia bisa bersaing dengan lulusan luar negeri dan mampu memenuhi tuntutan IFRS.

#### DAFTAR PUSTAKA

Akuntan Indonesia.2009. Siapkah mengantisipasi pemberlakuan IFRS & mencapai Standar Pendidikan Internasional yang dikeluarkan oleh IFAC ? Edisi No.17/Tahun III/Juni 2009

- Arifin, Taufiq. 2009. Pengaruh Principle-Based & Rule-Based Accounting Standards Terhadap Manajemen Laba Akrua & Manipulasi Aktivitas Riil. Tesis MSi UGM.
- Armstrong, C. S., Barth, M. E., Jagolinzer, A. D., Riedl, E. J., 2007. Market reaction to the adoption of IFRS in Europe. Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=903429>.
- Ball, R., Kothari, S. P., Robin, A., 2000. The effect of international institutional factors on properties of accounting earnings. *Journal of Accounting and Economics* 29, 1-51.
- Ball, R., Robin, A., Wu, J. S., 2003. Incentives versus standards: Properties of accounting income in four East Asian countries. *Journal of Accounting and Economics* 36, 235- 270.
- Bennet, B., M. Bradbury and H. Prangnell . 2006. Rules, Principles and Judgments in Accounting Standards. *Abacus*, Vol. 42, No. 2, 2006.
- Bradshaw, M. T., Bushee, B. J., Miller, G. S., 2004. Accounting choice, home bias, and U.S. investment in non-U.S. firms. *Journal of Accounting Research* 42, 795-841.
- Burgstahler, D., Hail, L., Leuz, C., 2006. The importance of reporting incentives: Earnings management in European private and public firms. *The Accounting Review*.
- Carmona & Trombetta, 2008. On the Global Acceptance of IAS/IFRS Accounting Standards: The Logic and Implications of the Principles-Based System” *Journal of Accounting and Public Policy*. vol. XXXII(3) 339-370, 2008.
- Choi, Frederick D.S., Carol Ann Frost, Garry K Meek. 1999. *International Accounting*. 3th edition. United States: Prentice Hall International.
- Covrig, V. L., DeFond, M. J., Hung, M., 2007. Foreign mutual funds holdings, and the voluntary adoption of international accounting standards. *Journal of Accounting Research* 45, 41-70.
- Merton, R. C., 1987. A simple model of capital market equilibrium with incomplete information. *Journal of Finance* 42, 483-510.
- Natawidnyana, 2008. “*International Financing Reporting Standards: A Brief Description*” .<http://natawidnyana-wordpress.com>
- Nelson, M. W. 2003. Behavioral evidence on the effects of principles- and rules-based standards. *Accounting Horizons* 17 (1): 91.104.
- Schipper, K. 2003. Principles-based accounting standards. *Accounting Horizons* 17 (1): 61.72.